



Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti



SEMINAR NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA BERKELANJUTAN

PROSIDING

Selasa, 26 Maret 2019

EDITOR :

DR. IR. HANNY WIRANEGARA, MT



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

KETUA DEWAN REDAKSI

Dr. Ir. Hanny Wiranegara, MT.

DEWAN REDAKSI

Ir. Ina Krisantia, M.Si, Ph.D

Dr. Ir. Ratnaningsih, M.T

Dr. Ir. Endrawati Fatimah, M.Pst

Dr. Ir. Diana Hendrawan, M.Si

LAYOUT EDITOR

Marselinus Nirwan Luru, ST., MSi

Olivia Seanders, ST

Anindita Ramadhani, ST., MT

DESAIN COVER

Olivia Seanders, ST

SEKRETARIAT SPWKB 2019

Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan

Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan

Gedung K, Lantai 7

Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Telepon: 021-5663232 ext 8773/8776

Fax: 021-5602575

Email: : semnas_pwkb@trisakti.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksanannya dengan baik dan sukses seluruh rangkaian kegiatan Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan (PWKB) yang mengusung tema utama tentang “Pengelolaan Metropolitan Berkelanjutan”. Seminar nasional PWKB merupakan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia. Ide Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan muncul sebagai tanggapan untuk berbagi dan mendiskusikan gagasan, pemikiran, konsep, pengalaman, dan regulasi dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, di antara para akademisi, peneliti, praktisi, pembuat kebijakan, serta kalangan swasta.

Pelaksanaan seminar nasional PWKB 2019, dihadiri oleh pembicara kunci Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE., MUP., Ph.D., Menteri Bappenas, serta para panelis dalam diskusi panel adalah Bapak Prof. Ir. Tommy Firman, MSc., Ph.D (Guru Besar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - ITB), Bapak Prof. Ir. Joni Hermana, MSCEs, Ph.D (Guru Besar Teknik Lingkungan – ITS), Bapak Assoc. Prof. Ir. Rustam Hakim, MT., Ph.D (Dosen Program Studi Arsitektur Lanskap – FALTL, Universitas Trisakti), yang berkompeten memberikan pandangan dalam bidang pembangunan wilayah dan kota berkelanjutan. Selain itu, kegiatan seminar nasional PWKB 2019 ini dilengkapi dengan sistem “*Call for Papers*” untuk menghimpun hasil penelitian dosen, peneliti dan mahasiswa. Kami harap Seminar Nasional PWKB ini memberikan kontribusi positif secara nyata dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi demi pembangunan wilayah dan kota berkelanjutan khususnya di Indonesia. Selain itu diharapkan seminar ini menjadi salah satu wadah bagi para peneliti untuk melakukan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi salah satu wadah untuk mempublikasi hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas sebagai peneliti.

Akhir kata, atas nama Panitia Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan 2019 mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Universitas Trisakti, Dekan Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, anggota komite pengarah, para *reviewer*, dan para panitia yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan Seminar Nasional FALTL 2019. Jika masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan seminar ini kami mohon dimaafkan.

Jakarta, Maret 2019

Panitia Pelaksana

Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Sambutan Ketua Panitia Pelaksana	iv
Sambutan Rektor Trisakti	v
Paparan <i>Keynote Speaker</i> Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.	vii
Paparan <i>Invited Speaker</i> Prof. Ir. Tommy Firman, MSc., Ph.D.	xxiv
Paparan <i>Invited Speaker</i> Prof. Ir. Joni Hermana, MSCEs., Ph.D.	xxx
Paparan <i>Invited Speaker</i> Ir. Rustam Hakim, MT, Ph.D.	lxiii
Susunan Panitia	c
Susunan Acara SEMNAS PWKB 2019	cii
Daftar Penulis	ciii
Daftar Isi Makalah	cvi

PANITIA
SEMINAR NASIONAL 2019
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRISAKTI

Steering Committee (SC)

Ketua : Ir. Ida Bagus Rabindra, MSP.
Anggota : Ir. Silia Yuslim, M.T
Hernani Yulinawati, ST, MURP
Dr. Ir. Endrawati Fatimah, M.Pst
Dr. Ir Dwi Indrawati, MS
Ir. Ina Krisantia, M.Si, Ph.D
Dr. Melati Ferianita Fachrul, M.S
Ir. Anita Sitawati Wartaman, M.Si

Reviewer : Ir. Rustam Hakim, MT, Ph.D
Ir. Ina Krisantia, M.Si, Ph.D
Dr. Ir. Ratnaningsih, M.T
Dr. Ir. Endrawati Fatimah, M.Pst
Dr. Ir. Diana Hendrawan, M.Si
Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T

Organizing Committee (OC)

Ketua Pelaksana : Dr. Yayat Supriyatna, MSP
Bendahara : Ir. Ety Indrawati, M.Si.

Sekretariat

Koordinator : Anindita Ramadhani, ST., MT
Anggota : Olivia Seanders, ST
Riyadi Semito, SE
Irmawati, SE., ME
Didin Irsudin, S.Kom
Nurkholik, S.Kom

Bidang Acara

Koordinator : Ir. Benny Benyamin Suharto, M.Si
Anggota : Ir. Qurrotu Aini Besila, M.Si.
Marselinus Nirwan Luru, ST., MSi
Riana Ayu Kusumadewi, ST., MT

Makalah dan Prosiding

Koordinator : Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T.
Anggota : Marselinus Nirwan Luru, ST., MSi
Olivia Seanders, ST

Publikasi Jurnal

Koordinator : Dr. Astri Rinanti Nugroho, M.T.

Bidang Konsumsi

Koordinator : Ir. Titiek Poerwanti Debora, MM
Anggota : Dra. Dwiyanti Kusumadewi, M.T.
Tri Yuniarti, S.Sos.
Elly Resmiati

Bidang Perlengkapan

Koordinator : Drs. RL. Pangaribowo, M.Si.
Anggota : Sutiman, S.Pd.
Agus Wahyudi
Supardi
Uum Sumarna

Bidang Informasi, Publikasi & Dokumentasi

Koordinator : Dr. Ir. Rully Besari Budiyanti, M.Km.
Anggota : Didin Irsudin, S.Kom
Rahman Dani

Bidang Akomodasi & Transportasi

Koordinator : Wawa Rukanda, SE
Anggota : Tarjo
Ateng Muhidin
Subur Subagyo

SUSUNAN ACARA
SEMINAR NASIONAL 2019
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA BERKELANJUTAN
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRISAKTI

WAKTU	ACARA			
09:00-10:00	Registrasi peserta dan <i>Coffee Break</i> Tempat: Gedung D Lantai 8, Universitas Trisakti			
10.00 – 10.20	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan sekaligus pembukaan seminar oleh Rektor Universitas Trisakti Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, PhD 			
10.20 – 10.30	Foto Bersama			
PANEL				
10:30-12:45	<i>Invited Speakers</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Ir. Tommy Firman, MSc. Ph.D. 2. Prof. Ir. Joni Hermana, MScEs., Ph.D. 3. Assoc.Prof . Ir. Rustam Hakim, MT, Ph.D. Moderator Dr. Ir. Endrawati Fatimah, MP.St.			
12:45-14:00	ISHOMA			
PLENARY				
14.00 – 15.00	Pembicara Kunci (<i>Keynote Speaker</i>) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.			
	Foto Bersama			
15.00 – 17.00	<i>Oral Presentation Sessions Kelas Paralel</i>			
	Kelas A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	Moderator Ir. Jaap Constantinus Levara, M.Sc.	Moderator Dr. Ir. Hanny Wiranegara, MT	Moderator Harry H.H., MLA, MSc., Ph.D.	Moderator Dr. Rositayanti Hadisoebroto,ST,MT
	Sub Tema Kerja sama antar daerah dan Private Public Partnership (P3)	Sub Tema Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Sub Tema Pengelolaan Prasarana Wilayah	Sub Tema Pengelolaan Pelayanan Dasar Perkotaan
17.00 – 17.15	Coffee Break			
17:15-17:30	1. Pembacaan Kesimpulan dan Penutupan oleh Dekan FALTL, Ir. Ida Bagus Rabindra, MSP 2. Foto Bersama			

DAFTAR PENULIS

JUDUL	PENULIS	EMAIL PEMAKALAH
Pengaruh Perilaku Masyarakat dan Kondisi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Terpadu Di Perumahan Puri Tigaraksa Tangerang	Nurhadi	nurhadi.nhd@bsi.ac.id
Pemanfaatan Keterbatasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kampung Luar Batang	B Chandra and T Fatimah	budijantochandra@gmail.com
Morfologi Kawasan Permukiman Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	Apriyan Dinata, Bahrul Ulum	apriyandinata@gmail.com
Kontribusi Metropolitan terhadap Polutan Udara Berbahaya Timbal dan Merkuri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batu Bara)	H Yulinawati, S Zulaiha, R Pristianty, L Siami	nandasyahrizal@yahoo.co.id
Konsumsi Air Di Kota Serang Tahun 2018	K Nadia, L Siami, Winarni	nadiakhairunnisa56@yahoo.com
Kajian Pengembangan Kawasan Kali Besar, Kota Tua Jakarta Sebagai Ruang Publik	Malindo Andhi Saputra dan Lilik Andriyani	andriyani.lilik@gmail.com
Kajian Penyediaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Asmat	Evan N Lumban Gaol , E Fatimah , dan Sugihartoyo	evan.nathanael.007@gmail.com
Livabilitas Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Pantai Panjang, Bengkulu	Selva Rosita Sari, Muhammad Sani Roychansyah	rositaselva@gmail.com
Morfologi Kawasan Permukiman Sekoja, Jambi	Aryo Akbar Aldiansyah and Ardhya Nareswari	aryo.akbar@gmail.com
Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang	F Aswil, E Fatimah dan Sugihartoyo	aswiladven@yahoo.co.id
Indikator Kota Berkelanjutan	Mohammad Erick Kusuma	erickkusuma22@live.com
Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis Berbasis Sektor Migas	D Hanifurrahman, E Fatimah, dan Sugihartoyo	dimashanifur@gmail.com
Ruang Sosial Anak Di Kampung Kota Pemukiman Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta	Carolin Monica Sitompul	carolinesitompul@gmail.com
Kajian Arah Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan	Intanadhira, A Sitawati dan B Benjamin	saskiaidhr@gmail.com
Kajian Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Peran Kota Palopo Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Susantri, A Sitawati dan Suharyanto	susantrird@gmail.com
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum Solear, PDAM Tirta Kerta Raharja -Kabupaten Tangerang	F Ramadhan, L Siami and Winarni	fajra023@gmail.com
Kajian Timbulan, Komposisi, dan Potensi Daur Ulang Sampah Sebagai Dasar Perencanaan Pengelolaan Sampah Kawasan Kampus Universitas Putra Indonesia (UPI)	Yommi Dewilda, Julianto	yommidewilda@gmail.com
Kajian Intensitas Kebisingan di Bandar Udara	I.M Klobor, M.F	melati@trisakti.ac.id

JUDUL	PENULIS	EMAIL PEMAKALAH
Internasional El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Fachrul, H. Yulinawati	
Pengolahan Air Limbah Non Kakus Permukiman Menggunakan Lahan Basah Buatan Sebagai Pilihan Layanan Dasar Lingkungan Perkotaan	M.F. Haryani, R. Hadisoebroto dan M.H. Aryantie	rositayanti@trisakti.ac.id
Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrengan Kota Surabaya)	Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, Muhammad Endi Ramadhan	sagungalit@unipasby.ac.id
Evaluasi Kualitas Air Situ Parigi, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	A Zharifa, M Feranita Fachrul, D Irvindiaty Hendrawan	athiya_zharifa@yahoo.com
Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Karyawan terhadap Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2004 di PT Garuda Metalindo	E Larantukan, E Suswanto and D Hendrawan	ety_larantukan@ymail.com/
Kajian Kualitas Air Situ Gede, Kota Tangerang dengan menggunakan metode indeks kualitas air national sanitation foundation (IKA-NSF)	H Purwati, M Feranita Fachrul, D Irvindiaty Hendrawan	hana.purwati95@gmail.com
Perencanaan Unit Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) Sapi Menjadi Pupuk Organik Dengan Metode Vermicomposting	A Syukra, D Indrawati, Ratnaningsih	annisasyukra01@gmail.com / Usakti Jakarta
Analisis Perbandingan Sistem Drainase Konvensional Dan Ecodrainage Di Kawasan Perumahan Citra Maja Raya (Tahap 1), Banten	Badzlina Monica F, Tazkiaturrizki, Winarni	mbadzlina@yahoo.com
Penentuan Kriteria Desain untuk Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah TelukGong, Jakarta Utara	Riestidy Dwicaesa Putri, Rositayanti Hadisoebroto, Ratnaningsih	riestidy.dp@gmail.com
Perencanaan Unit Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) Sapi Menjadi Pupuk Organik Dengan Penambahan Bioaktivator	F Fahrnisa, Ratnaningsih, D Indrawati	ratnaningsih@trisakti.ac.id
Perspektif Kebijakan Lokal Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Mataram	Nur Arning Tenggara Kasih, Dian Rahmawati	dnrahmawati66@gmail.com
Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Denpasar yang Berwawasan Lokal sebagai Upaya Penataan Ruang Berkelanjutan	Niken Pradonawati dan Dian Putri Noviyanti	nikenpradonawati@outlook.com
Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Menuju Kota Berkelanjutan	Ekki Sapta Kurniawan, Ina Krisantia, Arwindrasti	inakrisatia@yahoo.com
Pengaruh Parameter Lingkungan Terhadap Kandungan Senyawa Organik Danau Maninjau Sumatera Barat	Puti Sri Komala, Ansiha Nur, Ikrima Nazhifa,	putisrikomala@eng.unand.ac.id
Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kelurahan	Ariezki Yuliani Maulid Muhammad	Ariezkiyuliani3@gmail.com

JUDUL	PENULIS	EMAIL PEMAKALAH
	Iqbal, Heni Fitriani	
Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik menuju Kota Berkelanjutan	Aletha Sahalessy, Ina Krisantia, Rully Besari Budiyantri	inakrisantia@trisakti.ac.id
Pemeliharaan Lanskap Berkesinambungan di Kawasan Bersejarah: Pecinan Kota Tangerang	H Widjaja dan N D Madinah	hinijati@trisakti.ac.id
Perlindungan Taman Kota Sebagai Jejak Sejarah Perkotaan : Upaya Pengelolaan Taman Kota Sebagai Aset Kota	R Besari Budiyantri	rully @trisakti.ac.id
Keikutsertaan Arsitek Lanskap dalam Pembangunan Perkotaan	H Widjaja, R Febriani, B D Ramadhanty	hinijati@trisakti.ac.id
Masterplan Prasarana Sarana Umum Di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang	Martinus Bambang Susetyarto	mbsusetyarto@yahoo.com

DAFTAR ISI MAKALAH

JUDUL	PENULIS	HALAMAN
Pengaruh Perilaku Masyarakat dan Kondisi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Terpadu Di Perumahan Puri Tigaraksa Tangerang	Nurhadi	1-4
Pemanfaatan Keterbatasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kampung Luar Batang	B Chandra and T Fatimah	5-12
Morfologi Kawasan Permukiman Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	Apriyan Dinata, Bahrul Ulum	13-20
Kontribusi Metropolitan terhadap Polutan Udara Berbahaya Timbal dan Merkuri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batu Bara)	H Yulinawati, S Zulaiha, R Pristianty, L Siami	21-30
Konsumsi Air Di Kota Serang Tahun 2018	K Nadia, L Siami, Winarni	31-40
Kajian Pengembangan Kawasan Kali Besar, Kota Tua Jakarta Sebagai Ruang Publik	Malindo Andhi Saputra dan Lilik Andriyani	41-49
Kajian Penyediaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Asmat	Evan N Lumban Gaol , E Fatimah , dan Sugihartoyo	50-56
Livabilitas Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Pantai Panjang, Bengkulu	Selva Rosita Sari, Muhammad Sani Roychansyah	57-64
Morfologi Kawasan Permukiman Sekoja, Jambi	Aryo Akbar Aldiansyah and Ardhya Nareswari	65-74
Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang	F Aswil, E Fatimah dan Sugihartoyo	75-83
Indikator Kota Berkelanjutan	Mohammad Erick Kusuma	84-89
Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis Berbasis Sektor Migas	D Hanifurrahman, E Fatimah, dan Sugihartoyo	90-99
Ruang Sosial Anak Di Kampung Kota Pemukiman Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta	Carolin Monica Sitompul	100-113
Kajian Arahan Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan	Intanadhira, A Sitawati dan B Benjamin	114-122
Kajian Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Peran Kota Palopo Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Susantri, A Sitawati dan Suharyanto	123-131
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum Solear, PDAM Tirta Kerta Raharja -Kabupaten Tangerang	F Ramadhan, L Siami and Winarni	132-141
Kajian Timbulan, Komposisi, dan Potensi Daur Ulang Sampah Sebagai Dasar Perencanaan Pengelolaan Sampah Kawasan Kampus Universitas Putra Indonesia (UPI)	Yommi Dewilda, Julianto	142-151
Kajian Intensitas Kebisingan di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	I.M Klobor, M.F Fachrul, H. Yulinawati	152-158
Pengolahan Air Limbah Non Kakus Permukiman Menggunakan Lahan Basah Buatan Sebagai Pilihan Layanan Dasar Lingkungan Perkotaan	M.F. Haryani, R. Hadisoebroto dan M.H. Aryantie	159-165
Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrengan Kota	Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, Muhammad	166-176

JUDUL	PENULIS	HALAMAN
Surabaya)	Endi Ramadhan	
Evaluasi Kualitas Air Situ Parigi, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	A Zharifa, M Feranita Fachrul, D Irwindiaty Hendrawan	177-186
Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Karyawan terhadap Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2004 di PT Garuda Metalindo	E Larantukan , E Suswantoro and D Hendrawan	187-195
Kajian Kualitas Air Situ Gede, Kota Tangerang dengan menggunakan metode indeks kualitas air national sanitation foundation (IKA-NSF)	H Purwati, M Feranita Fachrul, D Irwindiaty Hendrawan	196-204
Perencanaan Unit Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) Sapi Menjadi Pupuk Organik Dengan Metode Vermicomposting	A Syukra, D Indrawati, Ratnaningsih	205-212
Analisis Perbandingan Sistem Drainase Konvensional Dan Ecodrainage Di Kawasan Perumahan Citra Maja Raya (Tahap 1), Banten	Badzlina Monica F, Tazkiaturrizki, Winarni	213-221
Penentuan Kriteria Desain untuk Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah TelukGong, Jakarta Utara	Riestidy Dwicaesa Putri, Rositayanti Hadisoebroto, Ratnaningsih	222-226
Perencanaan Unit Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) Sapi Menjadi Pupuk Organik Dengan Penambahan Bioaktivator	F Fahrnunisa, Ratnaningsih, D Indrawati	227-236
Perspektif Kebijakan Lokal Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Mataram	Nur Arning Tenggara Kasih, Dian Rahmawati	237-246
Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Denpasar yang Berwawasan Lokal sebagai Upaya Penataan Ruang Berkelanjutan	Niken Pradonawati dan Dian Putri Noviyanti	247-254
Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Menuju Kota Berkelanjutan	Ekki Sapta Kurniawan, Ina Krisantia, .Arwindrasti	255-264
Pengaruh Parameter Lingkungan Terhadap Kandungan Senyawa Organik Danau Maninjau Sumatera Barat	Puti Sri Komala, Ansiha Nur, Ikrima Nazhifa,	265-272
Penataan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kelurahan	Ariezki Yuliani Maulid Muhammad Iqbal, Heni Fitriani	273-282
Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik menuju Kota Berkelanjutan	Aletha Sahalessy, Ina Krisantia, Rully Besari Budiyanti	283-288
Pemeliharaan Lanskap Berkesinambungan di Kawasan Bersejarah: Pecinan Kota Tangerang	H Widjaja dan N D Madinah	289-297
Perlindungan Taman Kota Sebagai Jejak Sejarah Perkotaan : Upaya Pengelolaan Taman Kota Sebagai Aset Kota	R Besari Budiyanti	298-304
Keikutsertaan Arsitek Lanskap dalam Pembangunan Perkotaan	H Widjaja, R Febriani, B D Ramadhanty	305-311
Masterplan Prasarana Sarana Umum Di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang	Martinus Bambang Susetyarto	312-321

Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang

F A A Panutan¹, E Fatimah² dan Sugihartoyo³

^{1,2,3} Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia
E-mail: a s w i l a d v e n @ y a h o o . c o . i d

Abstrak. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan mengalami perkembangan, dari semula hanya fokus pada pendekatan pertahanan, saat ini juga melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilatar-belakangi hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan pengembangan yang perlu dilakukan agar PKSN Jasa yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat memberikan rekomendasi pengembangan tersebut, penelitian ini diawali dengan melakukan kajian kondisi eksisting di PKSN Jasa dan wilayah yang akan dilayani ditinjau dari aspek infrastruktur, transportasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif didasarkan pada analisis ekonomi dengan metode locatient quotient dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting di PKSN Jasa belum memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan upaya-upaya pengembangan PKSN Jasa dalam rangka terpenuhinya kriteria PKSN. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara adalah pembangunan prasarana Kantor Imigrasi, Kantor Kepabean dan Kantor karantina. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria sebagai simpul transportasi adalah peningkatan akses jalan kolektor primer dan pembangunan prasarana terminal angkutan penumpang Tipe B. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pusat pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan industri komoditas lada di PKSN Jasa untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Kata Kunci : PKSN Jasa, Kawasan Perbatasan Negara

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Jasa, yang merupakan kawasan di kecamatan Ketungau Hulu, sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Namun, wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki peran penting serta fungsinya dalam menjaga kedaulatan negara yang dapat menjadi pusat pertumbuhan terhadap kawasan sekitarnya justru menjadi daerah tertinggal dengan keterbatasan prasarana sarana infrastruktur yang mempengaruhi pula kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan (Noveria, 2017). Kondisi ini juga terjadi di kawasan Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang.

Studi ini memfokuskan pada upaya pengembangan yang perlu dilakukan agar PKSN Jasa memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang RTRWN. Untuk dapat memberikan rekomendasi maka perlu dikaji terlebih dahulu kondisi eksisting di PKSN Jasa dan wilayah yang akan dilayani. Aspek substansial yang akan dibahas dan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah aspek infrastruktur, aspek transportasi dan aspek ekonomi di kawasan perbatasan negara yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Negara (PKSN).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terdapat beberapa hirarki pusat pelayanan perbatasan negara yang mendukung pengembangan dan pembangunan di kawasan tersebut seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas (Lokpri), Ibukota Kabupaten, maupun pusat kota di negara tetangga (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015).

PKSN memiliki tiga kriteria yaitu : 1) Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; 2) Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; 3) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.

Sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terdapat tiga fungsi kawasan perbatasan yaitu : 1) Fungsi Legal kawasan perbatasan memiliki garis perbatasan yang berfungsi untuk membatasi wilayah tersebut dengan suatu standar yuridiksi dan peraturan negara yang berlaku; 2) Fungsi Kontrol kawasan perbatasan membatasi setiap pergerakan yang masuk maupun yang keluar, hal ini berfungsi agar dapat mengontrol pergerakan orang atau barang kedalam maupun keluar suatu negara; 3) Fungsi Fiskal Fungsi ketiga ini merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menerapkan harga fiskal untuk dapat masuk ke negara tersebut (Guo, 2005).

Pos Lintas Batas (PLBN) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara, PLBN perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pelintas batas seperti kantor pelayanan imigrasi, kantor pelayanan kepabean, kantor pelayanan karantina, kantor pelayanan keamanan maupun fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Jaringan pelayanan transportasi tersusun dari beberapa rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan yang sinergis. Pada jaringan transportasi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana transportasi merupakan serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005).

Simpul transportasi adalah suatu lokasi maupun titik yang berfungsi dalam kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, pembongkaran dan pemuatan barang, pengaturan rute perjalanan maupun tempat perpindahan angkutan intramoda dan antarmoda. Simpul transportasi adalah media peralihan muatan angkutan yang berperan penting dalam mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan pelayanan angkutan transportasi.

Secara fungsional, pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang merupakan konsentrasi kelompok usaha maupun cabang industri yang sifat hubungannya mempunyai unsur-unsur yang dinamis sehingga mampu menopang kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar atau daerah belakangnya, dan secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memberikan kemudahan dan mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang tersedia (Mahi, 2016).

Pembangunan yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Potensi daerah tersebut didapat melalui informasi data produksi (kontribusi dan LQ sektor terhadap PDRB) serta menentukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di setiap pusat pengembangan yang dapat tumbuh dan berfungsi untuk wilayah sekitarnya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari beberapa sumber. Data-data tersebut berupa data sekunder yang didapatkan

dari instansi-instansi terkait dan beberapa kajian studi literatur sebagai teori penunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis spasial.

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sector. Suatu kegiatan memiliki koefisien spesialisasi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya di suatu wilayah berarti wilayah tersebut memilikidaya saing yangkomparatif terhadap wilayah sekitarnya (Djakapermana,2010). Hasil analisis dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: jika $LQ > 1$ adalah sektor basis, $LQ < 1$ adalah sektor non basis, serta $LQ = 1$ adalah sektor hanya dapat memenuhi kebutuhan lokalnya. Analisis LQ memiliki rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{E_{ir} \times E_n}{E_r \times E_{in}}$$

Dimana:

E_{ir} = Nilai produksi (Rp) Sektor i di Kabupaten Sintang

E_r = Nilai produksi (Rp) total di Kabupaten Sintang

E_{in} = Nilai produksi (Rp) sektor i di wilayah yang lebih luas

E_n = Nilai Produksi (Rp) Total di wilayah yang lebih luas

Alat analisis lainnya yaitu analisis spasial. Secara teknis analisis spasial berkaitan dengan pengolahan informasi dan data spasial. Data yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dari suatu kerangka berpikir yang dibangun secara deduktif. Pada data spasial atau data yang memiliki referensi geografis, visualisasi digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis mengenai pola atau pengelompokan di dalam ruang geografis serta mengenai peran lokasi terhadap aktivitas manusia serta sistem lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kondisi Eksisting PKS_N Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara

PKS_N Jasa yang ada di kawasan perbatasan Ketungau Hulu memiliki tipologi PKS_N perbatasan darat yang berada di pintu gerbang perbatasan negara yang berbatasan dengan daerah pantu District Sri Aman, Malaysia.

Sesuai dengan kriteria PKS_N yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dalam mendukung kawasan perbatasan sebagai PKS_N, perlunya prasarana penunjang khusus yang terdapat di kawasan perbatasan, prasarana pendukung Pos LintasBatas Negara (PLBN) dimaksudkan agar dapat mempermudah dan mengefektifkan pelayanan yang mencakup seperti pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2007). Di kawasan PKS_N Jasa hanya baru terdapat pos TNI yang terletak di Desa Sungai Kelik sebagai prasarana keamanan yang menandakan masih belum terdapat prasarana penunjang wilayah perbatasan yang memadai.

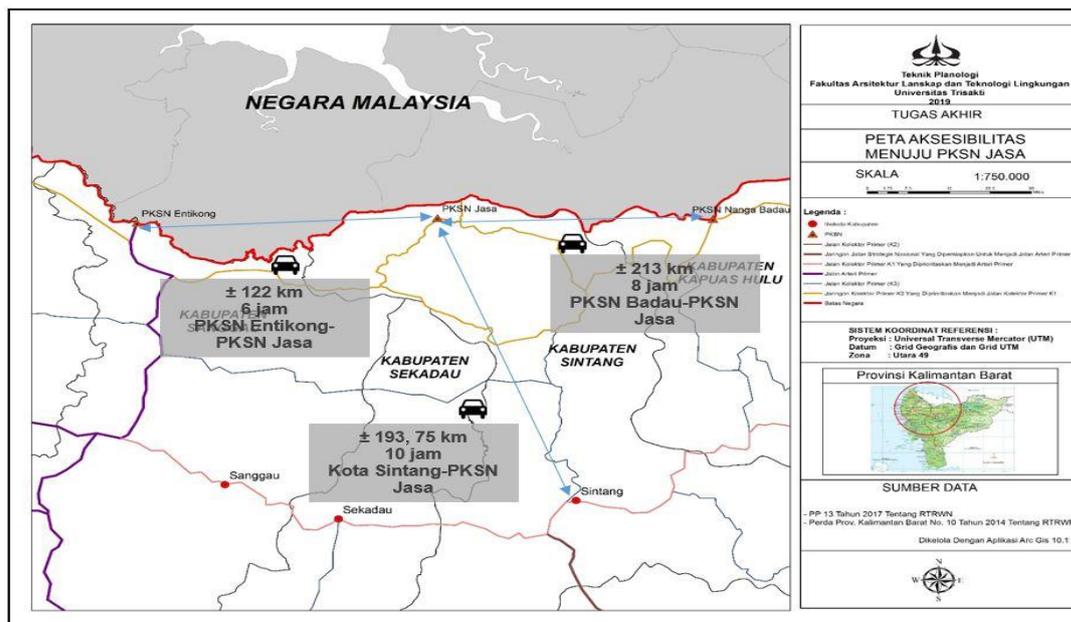
Meskipun tidak terdapatnya prasarana penunjang kawasan perbatasan yang memadai, pergerakan orang atau barang ke dalam maupun ke luar negeri tetap terjadi. Masyarakat di Kecamatan Ketungau Hulu, khususnya Desa Jasa dan Desa Sungai Kelik masih sering melakukan pergerakan ke Negara Malaysia untuk melakukan transaksi jual beli. Barang-barang dibawa masyarakat dari dalam negeri berupa hasil pertanian seperti beras dan sayurmayur, hasil perkebunan berupa lada dan karet dan hasil hutan berupa kulit kayu.

Sedangkan barang yang masuk ke dalam negeri berupa telur, ikan teri, sarden, makanan kaleng, gula, bawang merah, bawang putih, mesin kendaraan (speed boat), accu kendaraan dan bahan bakar minyak. Barang tersebut dibawa dengan menggunakan tenaga pemikul yang menempuh waktu 2 sampai 3 jam waktu perjalanan dengan berjalan kaki dari Desa Jasa ke Pasar Lachau Malaysia. Belum adanya pos lintas batas negara di kawasan perbatasan ketungau hulu membuat tidak terjadinya fungsi kawasan perbatasan yang bersifat mengontrol dan menjalankan kebijakan fiskal.

3.2 Analisis Kondisi Eksisting PKS N J a s a S e b a g a i S i m p u l U t a m a T r a n s p o r t a s i

Sama seperti kawasan perbatasan pada umumnya, PKS N J a s a yang ada di kawasan perbatasan di kecamatan ketungau hulu juga berada didaerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau dan infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas. Belum terdapatnya fasilitas terminal di PKS N J a s a menyebabkan tidak terjadinya pergerakan angkutan umum baik penumpang maupun barang transportasi darat di kawasan tersebut. Masyarakat di kawasan perbatasan masih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Kondisi jalan di kecamatan ketungau hulu masih didominasi jalan tanah dengan kategori rusak berat. Dalam menunjang mobilitas penduduk, mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi baik ke ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan maupun ke kabupaten lain.

Selain banyaknya jalan yang rusak di kecamatan ketungau hulu, aksesibilitas jaringan jalan transportasi darat menuju kecamatan ini pun masih sulit, baik dari ibukota kabupaten sintang maupun ke PKS N E n t i k o n g yang terletak di Kabupaten Sanggau dan PKS N N a n g a B a d a u yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Waktu tempuh menuju PKS N J a s a juga tergantung dengan kondisi cuaca, jika musim hujan beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena badan jalan yang terendam oleh genangan air seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Aksesibilitas Menuju PKS N J a s a

3.3 Analisis Kondisi Eksisting PKS N J a s a S e b a g a i P u s a t P e r t u m b u h a n E k o n o m i

Perwujudan kedaulatan dalam aspek ekonomi sendiri memberi tuntutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional agar menghindari ketergantungan dari pihak luar negeri. Pada kenyataannya, di PKS N J a s a kondisi perekonomian baik prasarana maupun sarana sama seperti di kawasan perbatasan lainnya yang aktivitas dan efektivitas ekonomi masyarakat yang masih rendah, sistem perdagangan antar penduduk di kawasan ini juga masih bersifat tradisional dikarenakan belum memadainya infrastruktur perekonomian seperti pasar dan bank. Tidak tersedianya kegiatan industri utama pada kawasan ini menyebabkan PKS N J a s a belum bisa menimbulkan *multiplier effect* bagi wilayah sekitarnya.

Sebagai pusat pertumbuhan, PKS N J a s a juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan masyarakat pada umumnya seperti fasilitas perdagangan,

fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Adapun ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial yang terdapat di PKS N Jasa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Gambaran Ketersediaan Fasilitas sosial di PKS N Jasa

Jenis Fasilitas	Standar Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2010	Ketersediaan Fasilitas di PKS N Jasa	Keterangan
Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Pasar Pusat Perdagangan Pergudangan Jasa Keuangan	24 Toko/Warung	Masih kurang
Fasilitas Pendidikan	TK SD SMP SMA	1 Unit TK Unit SD 1 Unit SMP	Masih kurang
Fasilitas Kesehatan	Posyandu Puskesmas Klinik Bersalin Apotik Rumah Sakit	1 Unit Puskesmas 2 Unit Posyandu 1 Unit Balai Pengobatan	Masih kurang

3.4 Upaya Pengembangan PKS N Jasa berdasarkan kriterianya

Dapat dilihat pada analisis analisis sebelumnya, sebagai wilayah yang terletak di beranda terdepan Negara Indonesia, PKS N Jasa belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, diperlukan upaya pengembangan yang dilakukan dalam pemenuhan PKS N Jasa sesuai dengan kritereri sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

3.4.1 Upaya Pengembangan PKS N Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara

Dalam meningkatkan peran PKS N Jasa sebagai pos lintas batas negara, dibutuhkan pembangunan fasilitas khusus penunjang kawasan perbatasan seperti kantor kepabean, kantor imigrasi dan kantor karantina serta kantor keamanan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara). Hal tersebut juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Di Kalimantan yang menetapkan fungsi di PKS N Jasa sebagai pusat pelayanan kepabean, imigrasi, karantina serta keamanan dan pertahanan.

Pada aspek pertahanan dan keamanan, diperlukan peningkatan pendekatan secara militer maupun nir militer. Pendekatan secara militer berupa peningkatan pengelolaan sarana prasarana pos pertahanan, penempatan aparat TNI maupun Polri, serta penempatan bangunan simbol negara dan tanda batas negara. Sedangkan nir militer berupa peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pembinaan masyarakat daerah perbatasan terkait nilai Pancasila.

3.4.2 Upaya Pengembangan PKS N Jasa Sebagai Simpul Utama Transportasi

Untuk mendukung PKS N Jasa sebagai simpul utama transportasi, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kondisi jaringan jalan dan ketersediaan sarana transportasi, khususnya di PKS N Jasa yang terletak di Kecamatan Ketungau Hulu yang kondisi jalannya masih buruk baik antar desa maupun ke daerah strategis lainnya. Perencanaan jaringan jalan nasional khususnya jalan poros perbatasan yang

melintasi PKSN Jasa maupun Lokasi Prioritas (Lokpri) pengembangan kawasan perbatasan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah dengan klasifikasi jalan kolektor primer tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Sedangkan untuk sarana transportasi agar menjadi simpul utama transportasi dan pusat pelayanan angkutan umum, perencanaan yang ada di PKSN Jasa yaitu pembangunan Terminal tipe B di Desa Jasa yang berfungsi sebagai terminal angkutan penumpang skala provinsi yang didukung dari Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang.

3.4.3 Upaya Pengembangan PKSN Jasa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Industri yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan yaitu tentang potensi pengembangan yang ada pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Informasi tentang potensimelalui data produksi (kontribusi dan LQ masing-masing terhadap PDRB). Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya (*hinterland*).

3.4.3.1. Analisis Sektor Basis Kabupaten Sintang

Pada analisis LQ dengan data PDRB Kabupaten Sintang terhadap Provinsi Kalimantan Barat dan PDB Nasional Indonesia dalam jangka waktu tahun 2012 sampai 2016, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis yang menjadi sektor yang paling tinggi dalam kontribusi ke PDRB Kabupaten Sintang dimana sektor tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat memungkinkan untuk diekspor ke daerah lainnya baik secara provinsi maupun nasional. Setelah dilakukan analisis LQ pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, terdapat beberapa sub sektor yang dikategorikan basis antara lain sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor jasa pertanian dan pemburuan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu. Jika dilihat berdasarkan PDRB, sub sektor tanaman perkebunan memiliki kontribusi paling tinggi dibanding sektor basis lainnya.

Jika dilihat pada penggunaan lahan perkebunan Kabupaten Sintang maupun Lokpri Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, lahan perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa sawit, tanaman karet dan tanaman lada.

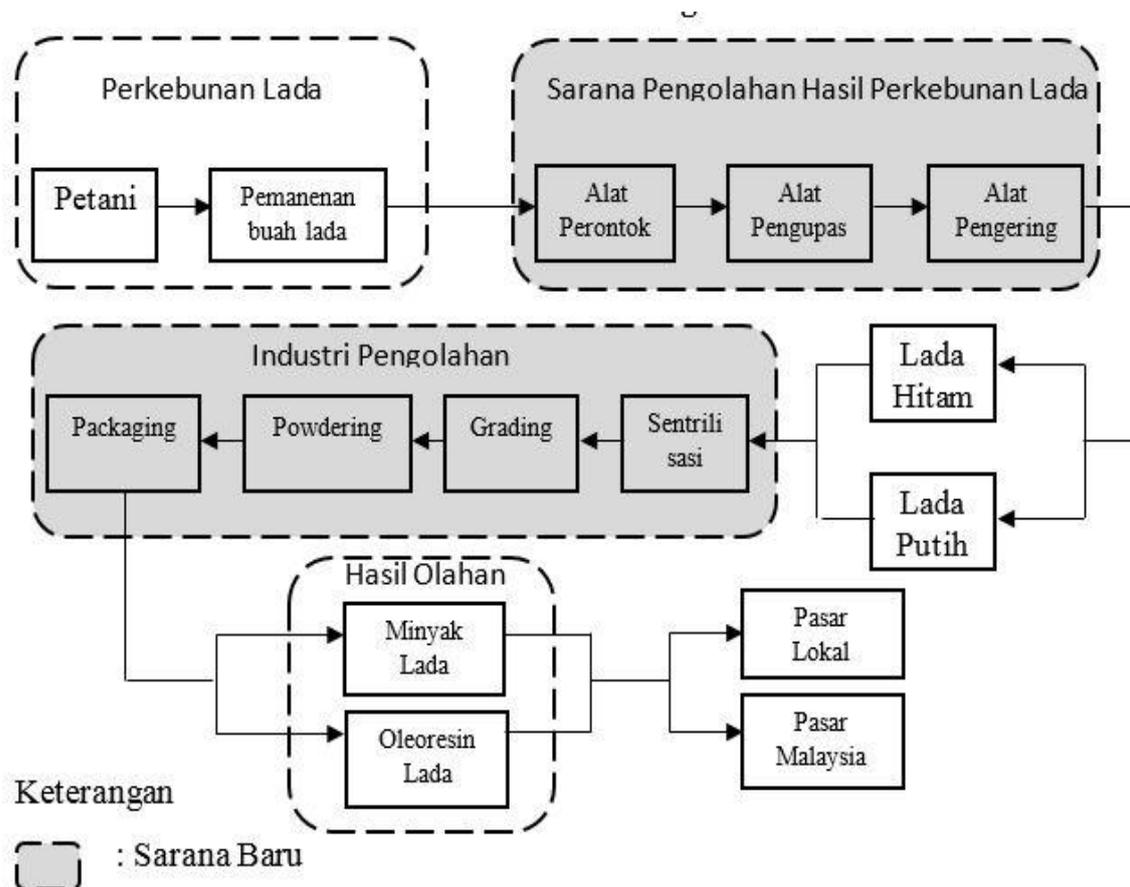
3.4.3.2 Analisis Kebutuhan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di PKSN Jasa

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya (*hinterland*). Salah satu konsep dasar teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*) yang berdasarkan pada ekonomi dan pengembangannya yaitu konsep Leading Industrie (Industri utama) dan perusahaan pendukung dinyatakan sebagai penggerak dari aktivitas ekonomi lainnya di pusat pertumbuhan.

Jika dilihat dari hirarki pusat pelayanan perbatasan negara, pengembangan perekonomian PKSN Jasa tentunya harus memiliki sinergitas terhadap Lokpri Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah maupun Ibukota Kabupaten Sintang. PKSN Jasa yang terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu menurut RTRW Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungau Hulu diarahkan menjadi kawasan dengan industri kecil menengah pengolahan makanan.

Pengembangan industri pengolahan Pengembangan industri khususnya industri dari hasil sektor perkebunan, dari komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sintang, komoditas lada sangat berpotensi untuk dikembangkan baik dalam industri pengolahan maupun sistem resi gudang yang nantinya PKSN ini dapat menjadi pasar dalam komoditas lada di Kabupaten Sintang dan berpotensi untuk diekspor ke luar negeri khususnya District Sri Aman Malaysia yang merupakan salah satu pusat perdagangan komoditas lada. Lada bisa menjadi beberapa macam produk yang diolah seperti lada

hijau, minyak lada, dan oleoresin. Sebelum diolah menjadi industri makanan, lada tersebut dapat diproses menjadi barang setengah jadi dengan alat perontokan, alat pengupas kulit dan alat pengeringan yang terdapat di masing-masing Lokpri. Produk-produk tersebut sangat prospektif dan berpeluang dikembangkan di PKS N Jasa, karena dapat diterapkan pada agroindustri perdesaan atau skala usaha kecil – menengah. Kebutuhan industri pengolahan lada dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kebutuhan Industri Pengolahan Lada di PKS N Jasa

3.4.3.3 Analisis Kebutuhan Fasilitas Sosial di PKS N Jasa

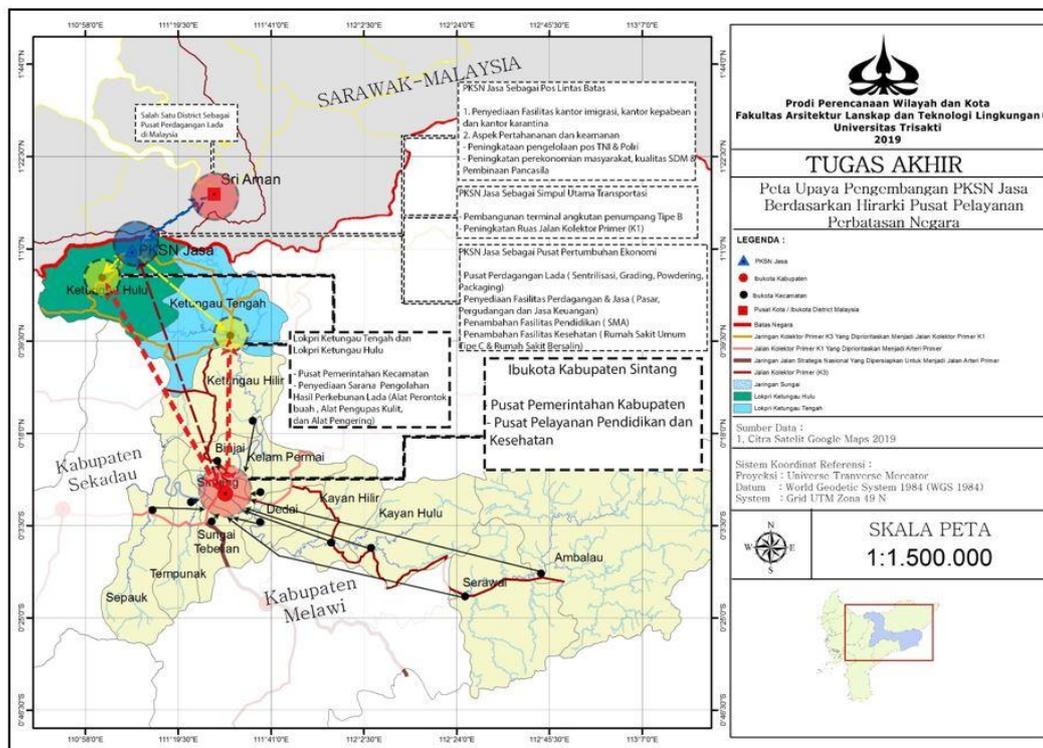
Sebagai pusat pertumbuhan, PKS N Jasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus memiliki banyak fasilitas dan kemudahan seperti penyediaan pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha berkembang pada kawasan ini.

PKS N Jasa yang berpotensi menjadi kawasan yang dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah yang pada tahun 2036 jumlah penduduk di dua kecamatan ini berjumlah 57.455 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, PKS N Jasa dapat berkembang menjadi kota otonom kecil yang penduduknya berjumlah 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kebutuhan fasilitas-fasilitas sosial di PKS N Jasa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Kabutuhan Fasilitas Sosial di PKSN Jasa

Jenis Fasilitas	Ketersediaan Fasilitas	Kebutuhan Fasilitas
Fasilitas Perdagangan dan Jasa	- 24 Toko dan Warung	- Pasar - Pergudangan - Jasa Keuangan (Bank/Non bank) <i>Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010</i>
Fasilitas Pendidikan	- 1 Buah Taman Kanak-kanak - 2 Buah Sekolah Dasar - 1 Buah Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Fasilitas Sekolah Menengah Atas <i>Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010</i>
Fasilitas Kesehatan	- 1 Buah Puskesmas - 1 Buah Balai Pengobatan - 2 Buah Posyandu	Penambahan Rumah Sakit Umum Tipe C dan Rumah Sakit Bersalin <i>Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 dan RTRW Kabupaten Sintang</i>
Fasilitas Pemerintahan	- Kantor Desa	Penambahan Pelayanan Pemerintahan Pengelola Perbatasan (Kantor Imigrasi, Kantor Kepabean dan Kantor Karantina) <i>Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007</i>

Dari beberapa upaya pengembangan PKSN Jasa sebagai pos lintas batas, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Upaya Pengembangan PKSN Jasa berdasarkan Hirarki Pusat Pelayanan Perbatasan Negara

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis- analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada PKS N Jasa masih kurang memadai baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas- fasilitas sosial yang ada. Adapun upaya pengembangan yang dapat dilakukan di PKS N Jasa sebagai pos lintas batas negara yaitu pembangunan pelayanan pemerintah seperti kantor bea cukai, kantor imigrasi, kantor karantina yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan- kebijakan pemerintah. Untuk mendukung PKS N Jasa sebagai simpul utama transportasi, pemerintah sudah melakukan program perencanaan dengan pembangunan jalan Kolektor Primer (K1) yang akan melintasi PKS N Jasa dan wilayah perbatasan lainnya. PKS N Jasa juga akan dilengkapi fasilitas transportasi berupa terminal tipe B yang akan melayani transportasi angkutan penumpang skala provinsi. Adapun upaya dalam pengembangan perekonomian di PKS N Jasa yaitu pengembangan industri kecil menengah pengolahan makanan terutama dari komoditas lada dan pembangunan fasilitas- fasilitas sosial yang memadai terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan dalam menopang wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djakapermana, Ruchyat Deni. (2010). *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*. IPB Press. Bogor.
- Guo, Rongxing. (2005). *Cross-Border Resource Management; Theory and Practice*. Elseiver. Amsterdam.
- Mahi, Ali Kabul. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Noveria, dkk. (2017). *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*. 13 April 2015. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036*. 31 Desember 2015. Sintang.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034*. 31 Desember 2014. Pontianak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 *Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan*. 4 November 2010. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 *Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara*. 26 Maret 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 *Sistem Transportasi Nasional*. 12 Agustus 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. 7 April 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77.
- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 *Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64. Jakarta.

document-32 PKSN.pdf

by Endrawati Fatimah FALTL

Submission date: 29-May-2024 09:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2390852133

File name: document-32_PKSN.pdf (947.39K)

Word count: 3507

Character count: 22782

Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang

F A A Panutan¹, E Fatimah² dan Sugihartoyo³

^{1,2,3} Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia
E-mail: aswilda ven@yahoo.co.id

Abstrak. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan mengalami perkembangan, dari semula hanya fokus pada pendekatan pertahanan, saat ini juga melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilatar-belakangi hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan pengembangan yang perlu dilakukan agar PKSN Jasa yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat memberikan rekomendasi pengembangan tersebut, penelitian ini diawali dengan melakukan kajian kondisi eksisting di PKSN Jasa dan wilayah yang akan dilayani ditinjau dari aspek infrastruktur, transportasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif didasarkan pada analisis ekonomi dengan metode locatient quotient dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting di PKSN Jasa belum memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan upaya-upaya pengembangan PKSN Jasa dalam rangka terpenuhinya kriteria PKSN. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria sebagai pos lintas batas negara adalah pembangunan prasarana Kantor Imigrasi, Kantor Kepabean dan Kantor karantina. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria sebagai simpul transportasi adalah peningkatan akses jalan kolektor primer dan pembangunan prasarana terminal angkutan penumpang Tipe B. Upaya yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pusat pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan industri komoditas lada di PKSN Jasa untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Kata Kunci : PKSN Jasa, Kawasan Perbatasan Negara

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Jasa, yang merupakan kawasan di kecamatan Ketungau Hulu, sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Namun, wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki peran penting serta fungsinya dalam menjaga kedaulatan negara yang dapat menjadi pusat pertumbuhan terhadap kawasan sekitarnya justru menjadi daerah tertinggal dengan keterbatasan prasarana sarana infrastruktur yang mempengaruhi pula kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan (Noveria, 2017). Kondisi ini juga terjadi di kawasan Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang.

Studi ini memfokuskan pada upaya pengembangan yang perlu dilakukan agar PKSN Jasa memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang RTRWN. Untuk dapat memberikan rekomendasi maka perlu dikaji terlebih dahulu kondisi eksisting di PKSN Jasa dan wilayah yang akan dilayani. Aspek substansial yang akan dibahas dan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah aspek infrastruktur, aspek transportasi dan aspek ekonomi di kawasan perbatasan negara yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Negara (PKSN).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terdapat beberapa hirarki pusat pelayanan perbatasan negara yang mendukung pengembangan dan pembangunan di kawasan tersebut seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas (Lokpri), Ibukota Kabupaten, maupun pusat kota di negara tetangga (Badan Nasional Pengelol Perbatasan, 2015).

PKSN memiliki tiga kriteria yaitu : 1) Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; 2) Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; 3) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.

Sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terdapat tiga fungsi kawasan perbatasan yaitu : 1) Fungsi Legal kawasan perbatasan memiliki garis perbatasan yang berfungsi untuk membatasi wilayah tersebut dengan suatu standar yuridiksi dan peraturan negara yang berlaku; 2) Fungsi Kontrol kawasan perbatasan membatasi setiap pergerakan yang masuk maupun yang keluar, hal ini berfungsi agar dapat mengontrol pergerakan orang atau barang kedalam maupun keluar suatu negara; 3) Fungsi Fiskal Fungsi ketiga ini merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menerapkan harga fiskal untuk dapat masuk ke negara tersebut (Guo, 2005).

Pos Lintas Batas (PLBN) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara, PLBN perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pelintas batas seperti kantor pelayanan imigrasi, kantor pelayanan kepabean, kantor pelayanan karantina, kantor pelayanan keamanan maupun fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Jaringan pelayanan transportasi tersusun dari beberapa rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan yang sinergis. Pada jaringan transportasi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana transportasi merupakan serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005).

Simpul transportasi adalah suatu lokasi maupun titik yang berfungsi dalam kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, pembongkaran dan pemuatan barang, pengaturan rute perjalanan maupun tempat perpindahan angkutan intramoda dan antarmoda. Simpul transportasi adalah media peralihan muatan angkutan yang berperan penting dalam mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan pelayanan angkutan transportasi.

Secara fungsional, pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang merupakan konsentrasi kelompok usaha maupun cabang industri yang sifat hubungannya mempunyai unsur-unsur yang dinamis sehingga mampu menopang kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar atau daerah belakangnya, dan secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memberikan kemudahan dan mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di daerah yang bersangkutan dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang tersedia (Mahi, 2016).

Pembangunan yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Potensi daerah tersebut didapat melalui informasi data produksi (kontribusi dan LQ sektor terhadap PDRB) serta menentukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di setiap pusat pengembangan yang dapat tumbuh dan berfungsi untuk wilayah sekitarnya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dari beberapa sumber. Data-data tersebut berupa data sekunder yang didapatkan

dari instansi-instansi terkait dan beberapa kajian studi literatur sebagai teori penunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis spasial.

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sector. Suatu kegiatan memiliki koefisien spesialisasi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya di suatu wilayah berarti wilayah tersebut memiliki daya saing yang komparatif terhadap wilayah sekitarnya (Djakapermana, 2010). Hasil analisis dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: jika $LQ > 1$ adalah sektor basis, $LQ < 1$ adalah sektor non basis, serta $LQ = 1$ adalah sektor hanya dapat memenuhi kebutuhan lokalnya. Analisis LQ memiliki rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{E_{ir} \cdot X E_n}{E_r \cdot X E_{in}}$$

Dimana:

E_{ir} = Nilai produksi (Rp) Sektor i di Kabupaten Sintang

E_r = Nilai produksi (Rp) total di Kabupaten Sintang

E_{in} = Nilai produksi (Rp) sektor i di wilayah yang lebih luas

E_n = Nilai Produksi (Rp) Total di wilayah yang lebih luas

Alat analisis lainnya yaitu analisis spasial. Secara teknis analisis spasial berkaitan dengan pengolahan informasi dan data spasial. Data yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dari suatu kerangka berpikir yang dibangun secara deduktif. Pada data spasial atau data yang memiliki referensi geografis, visualisasi digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis mengenai pola atau pengelompokan di dalam ruang geografis serta mengenai peran lokasi terhadap aktivitas manusia serta sistem lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kondisi Eksisting PKSN Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara

PKSN Jasa yang ada di kawasan perbatasan Ketungau Hulu memiliki tipologi PKSN perbatasan darat yang berada di pintu gerbang perbatasan negara yang berbatasan dengan daerah pantu District Sri Aman, Malaysia.

Sesuai dengan kriteria PKSN yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dalam mendukung kawasan perbatasan sebagai PKSN, perlunya prasarana penunjang khusus yang terdapat di kawasan perbatasan, prasarana pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dimaksudkan agar dapat mempermudah dan mengefektifkan pelayanan yang mencakup seperti pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2007). Di kawasan PKSN Jasa hanya baru terdapat pos TNI yang terletak di Desa Sungai Kelik sebagai prasarana keamanan yang menandakan masih belum terdapat prasarana penunjang wilayah perbatasan yang memadai.

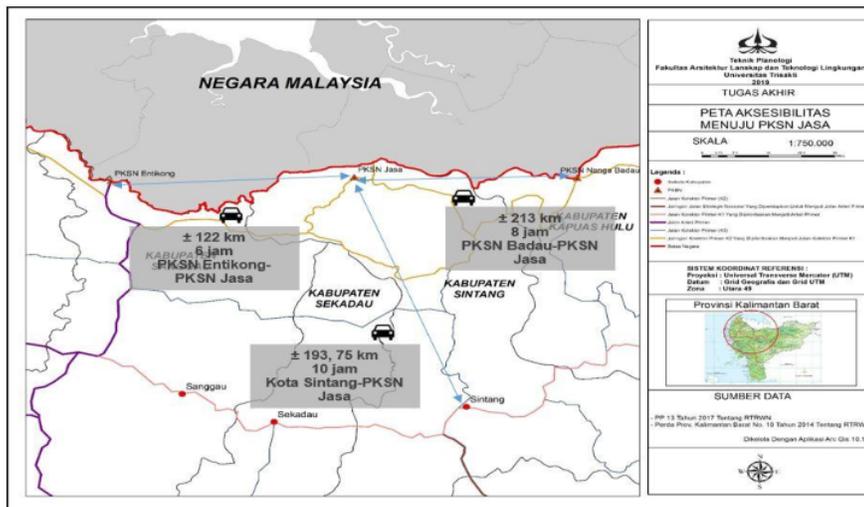
Meskipun tidak terdapatnya prasarana penunjang kawasan perbatasan yang memadai, pergerakan orang atau barang ke dalam maupun ke luar negeri tetap terjadi. Masyarakat di Kecamatan Ketungau Hulu, khususnya Desa Jasa dan Desa Sungai Kelik masih sering melakukan pergerakan ke Negara Malaysia untuk melakukan transaksi jual beli. Barang-barang dibawa masyarakat dari dalam negeri berupa hasil pertanian seperti beras dan sayur mayur, hasil perkebunan berupa lada dan karet dan hasil hutan berupa kulit kayu.

Sedangkan barang yang masuk ke dalam negeri berupa telur, ikan teri, sarden, makanan kaleng, gula, bawang merah, bawang putih, mesin kendaraan (speed boat), accu kendaraan dan bahan bakar minyak. Barang tersebut dibawa dengan menggunakan tenaga pemikul yang menempuh waktu 2 sampai 3 jam waktu perjalanan dengan berjalan kaki dari Desa Jasa ke Pasar Lachau Malaysia. Belum adanya pos lintas batas negara di kawasan perbatasan ketungau hulu membuat tidak terjadinya fungsi kawasan perbatasan yang bersifat mengontrol dan menjalankan kebijakan fiskal.

3.2 Analisis Kondisi Eksisting PKS N Jasa Sebagai Simpul Utama Transportasi

Sama seperti kawasan perbatasan pada umumnya, PKS N Jasa yang ada di kawasan perbatasan di kecamatan ketungau hulu juga berada didaerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau dan infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas. Belum terdapatnya fasilitas terminal di PKS N Jasa menyebabkan tidak terjadinya pergerakan angkutan umum baik penumpang maupun barang transportasi darat di kawasan tersebut. Masyarakat di kawasan perbatasan masih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Kondisi jalan di kecamatan ketungau hulu masih didominasi jalan tanah dengan kategori rusak berat. Dalam menunjang mobilitas penduduk, mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi baik ke ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan maupun ke kabupaten lain.

Selain banyaknya jalan yang rusak di kecamatan ketungau hulu, aksesibilitas jaringan jalan transportasi darat menuju kecamatan ini pun masih sulit, baik dari ibukota kabupaten sintang maupun ke PKS N Entikong yang terletak di Kabupaten Sanggau dan PKS N Nanga Badau yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Waktu tempuh menuju PKS N Jasa juga tergantung dengan kondisi cuaca, jika musim hujan beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena badan jalan yang terendam oleh genangan air seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Aksesibilitas Menuju PKS N Jasa

3.3 Analisis Kondisi Eksisting PKS N Jasa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perwujudan kedaulatan dalam aspek ekonomi sendiri memberi tuntutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional agar menghindari ketergantungan dari pihak luar negeri. Pada kenyataannya, di PKS N Jasa kondisi perekonomian baik prasarana maupun sarana sama seperti di kawasan perbatasan lainnya yang aktivitas dan efektivitas ekonomi masyarakat yang masih rendah, sistem perdagangan antar penduduk di kawasan ini juga masih bersifat tradisional dikarenakan belum memadainya infrastruktur perekonomian seperti pasar dan bank. Tidak tersedianya kegiatan industri utama pada kawasan ini menyebabkan PKS N Jasa belum bisa menimbulkan *multiplier effect* bagi wilayah sekitarnya.

Sebagai pusat pertumbuhan, PKS N Jasa juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan masyarakat pada umumnya seperti fasilitas perdagangan,

fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Adapun ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial yang terdapat di PKS N Jasa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Gambaran Ketersediaan Fasilitas sosial di PKS N Jasa

Jenis Fasilitas	Standar Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2010	Ketersediaan Fasilitas di PKS N Jasa	Keterangan
Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Pasar Pusat Perdagangan Pergudangan Jasa Keuangan	24 Toko/Warung	Masih kurang
Fasilitas Pendidikan	TK SD SMP SMA	1 Unit TK Unit SD 1 Unit SMP	Masih kurang
Fasilitas Kesehatan	Posyandu Puskesmas Klinik Bersalin Apotik Rumah Sakit	1 Unit Puskesmas 2 Unit Posyandu 1 Unit Balai Pengobatan	Masih kurang

3.4 Upaya Pengembangan PKS N Jasa berdasarkan kriterianya

Dapat dilihat pada analisis analisis sebelumnya, sebagai wilayah yang terletak di beranda terdepan Negara Indonesia, PKS N Jasa belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, diperlukan upaya pengembangan yang dilakukan dalam pemenuhan PKS N Jasa sesuai dengan kriterer sebagai pos lintas batas negara, simpul utama transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

3.4.1 Upaya Pengembangan PKS N Jasa Sebagai Pos Lintas Batas Negara

Dalam meningkatkan peran PKS N Jasa sebagai pos lintas batas negara, dibutuhkan pembangunan fasilitas khusus penunjang kawasan perbatasan seperti kantor kepabean, kantor imigrasi dan kantor karantina serta kantor keamanan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan LintasBatas Antar Negara). Hal tersebut juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Di Kalimantan yang menetapkan fungsi di PKS N Jasa sebagai pusat pelayanan kepabean, imigrasi, karantina serta keamanan dan pertahanan.

Pada aspek pertahanan dan keamanan, diperlukan peningkatan pendekatan secara militer maupun nir militer. Pendekatan secara militer berupa peningkatan pengelolaan sarana prasarana pos pertahanan, penempatan aparat TNI maupun Polri, serta penempatan bangunan simbol negara dan tanda batas negara. Sedangkan nir militer berupa peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah terkait, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pembinaan masyarakat daerah perbatasan terkait nilai Pancasila.

3.4.2 Upaya Pengembangan PKS N Jasa Sebagai Simpul Utama Transportasi

Untuk mendukung PKS N Jasa sebagai simpul utama transportasi, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kondisi jaringan jalan dan ketersediaan sarana transportasi, khususnya di PKS N Jasa yang terletak di Kecamatan Ketungau Hulu yang kondisi jalannya masih buruk baik antar desa maupun ke daerah strategis lainnya. Perencanaan jaringan jalan nasional khususnya jalan poros perbatasan yang

melintasi PKSN Jasa maupun Lokasi Prioritas (Lokpri) pengembangan kawasan perbatasan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah dengan klasifikasi jalan kolektor primer tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Sedangkan untuk sarana transportasi agar menjadi simpul utama transportasi dan pusat pelayanan angkutan umum, perencanaan yang ada di PKSN Jasa yaitu pembangunan Terminal tipe B di Desa Jasa yang berfungsi sebagai terminal angkutan penumpang skala provinsi yang didukung dari Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang.

3.4.3 Upaya Pengembangan PKSN Jasa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Industri yang diprioritaskan pada pusat pertumbuhan yaitu tentang potensi pengembangan yang ada pada wilayah yang bersangkutan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Informasi tentang potensimelalui data produksi (kontribusi dan LQ masing-masing terhadap PDRB). Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya (*hinterland*).

3.4.3.1. Analisis Sektor Basis Kabupaten Sintang

Pada analisis LQ dengan data PDRB Kabupaten Sintang terhadap Provinsi Kalimantan Barat dan PDB Nasional Indonesia dalam jangka waktu tahun 2012 sampai 2016, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis yang menjadi sektor yang paling tinggi dalam kontribusi ke PDRB Kabupaten Sintang dimana sektor tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat memungkinkan untuk diekspor ke daerah lainnya baik secara provinsi maupun nasional. Setelah dilakukan analisis LQ pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, terdapat beberapa sub sektor yang dikategorikan basis antara lain sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor jasa pertanian dan pemburuan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu. Jika dilihat berdasarkan PDRB, sub sektor tanaman perkebunan memiliki kontribusi paling tinggi dibanding sektor basis lainnya.

Jika dilihat pada penggunaan lahan perkebunan Kabupaten Sintang maupun Lokpri Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, lahan perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa sawit, tanaman karet dan tanaman lada.

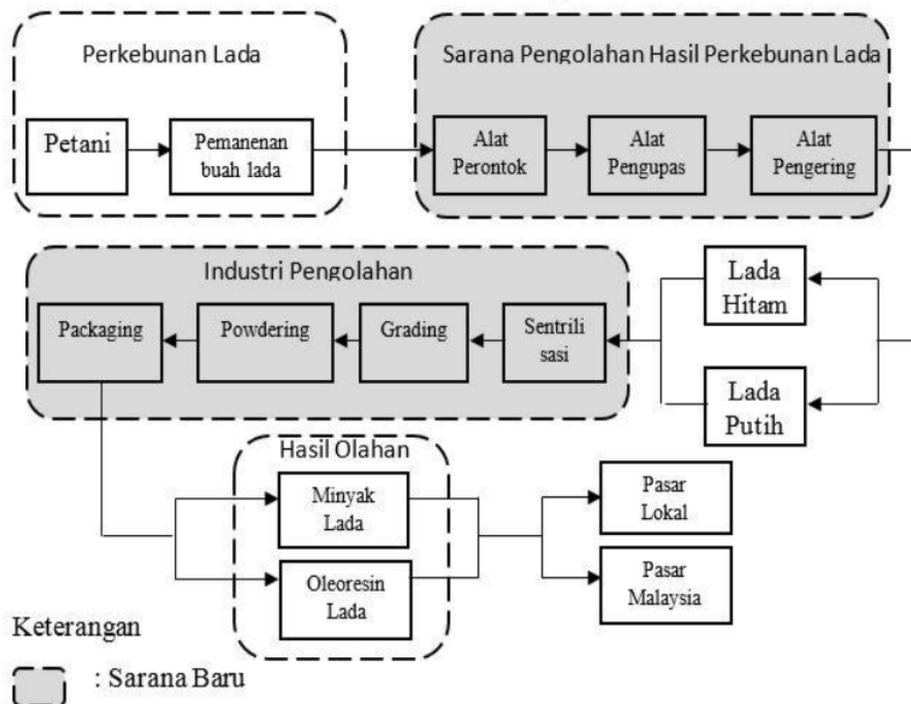
3.4.3.2 Analisis Kebutuhan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di PKSN Jasa

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN Jasa harus mampu mendorong wilayah sekitarnya (*hinterland*). Salah satu konsep dasar teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*) yang berdasarkan pada ekonomi dan pengembangannya yaitu konsep Leading Industrie (Industri utama) dan perusahaan pendukung dinyatakan sebagai penggerak dari aktivitas ekonomi lainnya di pusat pertumbuhan.

Jika dilihat dari hirarki pusat pelayanan perbatasan negara, pengembangan perekonomian PKSN Jasa tentunya harus memiliki sinergitas terhadap Lokpri Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah maupun Ibukota Kabupaten Sintang. PKSN Jasa yang terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu menurut RTRW Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungau Hulu diarahkan menjadi kawasan dengan industri kecil menengah pengolahan makanan.

Pengembangan industri pengolahan Pengembangan industri khususnya industri dari hasil sektor perkebunan, dari komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sintang, komoditas lada sangat berpotensi untuk dikembangkan baik dalam industri pengolahan maupun sistem resi gudang yang nantinya PKSN ini dapat menjadi pasar dalam komoditas lada di Kabupaten Sintang dan berpotensi untuk diekspor ke luar negeri khususnya District Sri Aman Malaysia yang merupakan salah satu pusat perdagangan komoditas lada. Lada bisa menjadi beberapa macam produk yang diolah seperti lada

hijau, minyak lada, dan oleoresin. Sebelum diolah menjadi industri makanan, lada tersebut dapat diproses menjadi barang setengah jadi dengan alat perontokan, alat pengupas kulit dan alat pengeringan yang terdapat di masing-masing Lokpri. Produk-produk tersebut sangat prospektif dan berpeluang dikembangkan di PKS N Jasa, karena dapat diterapkan pada agroindustri perdesaan atau skala usaha kecil – menengah. Kebutuhan industri pengolahan lada dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kebutuhan Industri Pengolahan Lada di PKS N Jasa

3.4.3.3 Analisis Kebutuhan Fasilitas Sosial di PKS N Jasa

Sebagai pusat pertumbuhan, PKS N Jasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus memiliki banyak fasilitas dan kemudahan seperti penyediaan pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha berkembang pada kawasan ini.

PKS N Jasa yang berpotensi menjadi kawasan yang dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah yang pada tahun 2036 jumlah penduduk di dua kecamatan ini berjumlah 57.455 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, PKS N Jasa dapat berkembang menjadi kota otonom kecil yang penduduknya berjumlah 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kebutuhan fasilitas-fasilitas sosial di PKS N Jasa dapat dilihat pada Tabel 2.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di PKS N Jasa masih kurang memadai baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas sosial yang ada. Adapun upaya pengembangan yang dapat dilakukan di PKS N Jasa sebagai pos lintas batas negara yaitu pembangunan pelayanan pemerintah seperti kantor bea cukai, kantor imigrasi, kantor karantina yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk mendukung PKS N Jasa sebagai simpul utama transportasi, pemerintah sudah melakukan program perencanaan dengan pembangunan jalan Kolektor Primer (K1) yang akan melintasi PKS N Jasa dan wilayah perbatasan lainnya. PKS N Jasa juga akan dilengkapi fasilitas transportasi berupa terminal tipe B yang akan melayani transportasi angkutan penumpang skala provinsi. Adapun upaya dalam pengembangan perekonomian di PKS N Jasa yaitu pengembangan industri kecil menengah pengolahan makanan terutama dari komoditas lada dan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang memadai terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan dalam menopang wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djakapermana, Ruchyat Deni. (2010). *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*. IPB Press. Bogor.
- Guo, Rongxing. (2005). *Cross-Border Resource Management; Theory and Practice*. Elsevier. Amsterdam.
- Mahi, Ali Kabul. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Noveria, dkk. (2017). *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*. 13 April 2015. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036*. 31 Desember 2015. Sintang.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034*. 31 Desember 2014. Pontianak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 *Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan*. 4 November 2010. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 *Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara*. 26 Maret 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 *Sistem Transportasi Nasional*. 12 Agustus 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. 7 April 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77.
- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 *Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64. Jakarta.

document-32 PKSN.pdf

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 10 words

document-32 PKSN.pdf

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9